

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Sejarah Indonesia mencatatkan bahwa sejak jaman kerajaan terutama di Pulau Jawa, perempuan telah dijadikan komoditas atau barang hantaran untuk persembahan kepada raja tanah Jawa terutama jaman Kerajaan Mataram yang dijadikan permaisuri ataupun selir. (Hull dkk, 1997: 3) Perempuan dari kelas menengah ke atas seperti putri bangsawan diberikan sebagai tanda kehormatan, kesetiaan, dan persahabatan antar kerajaan. Sedangkan perempuan yang berasal dari kelas menengah ke bawah kebanyakan dijual atau diserahkan oleh keluarganya kepada raja demi meningkatkan derajat dan martabat keluarga walau hanya sebatas menjadi selir raja.

Banyaknya selir atau perempuan pendamping raja dianggap sebagai tolak ukur kekuatan posisi kekuasaan Sang Raja dimata rakyat dan kerajaan lain. Beranggapan bahwa seorang raja yang tangguh fisiknya dan berselir banyak karena mampu mempercepat reproduksi lahirnya calon-calon raja baru yang nantinya akan memperluas kekuasaan dan kekuatan raja. Pada masa sejarah kerajaan Indonesia terlihat bahwa perempuan hanya dijadikan sebagai nilai tukar atau nilai barang untuk memuaskan atau memenuhi tuntutan laki-laki untuk mendapatkan sebuah pengakuan dan kekuasaan.

Perkembangan atas penggunaan perempuan sebagai pemuas tuntutan laki-laki secara pesat dan *massive* terjadi pada saat jaman penjajahan Belanda dan

Jepang ke Indonesia. Keluarga pribumi merasa terancam dengan adanya kehadiran penjajah di Indonesia, sehingga apabila mereka memiliki anak perempuan, maka lebih baik anak perempuannya diberikan agar mendapatkan imbalan materi. Saat itu, para lelaki bujang pribumi maupun penjajah membutuhkan hubungan dengan perempuan yang hanya dibatasi dengan motivasi komersil tanpa harus berhubungan sah sebagai suami istri. Karena mereka menganggap bahwa pekerjaan mereka yang selalu berputar pada pekerjaan laki-laki, membuat hasrat akan berhubungan seksual semakin besar.

Ketersediaan akan perempuan dan hubungan seksual di luar perkawinan seperti lumrah dibiarkan oleh pemerintah. Sehingga para perempuan yang kemudian menanggung beban moral dan sosial di masyarakat. Karena perempuan yang bekerja sebagai “wanita publik” yang kemudian sekarang dikenal dengan nama “wanita tuna susila” dianggap menimbulkan penyakit sosial dan menyebarkan virus penyakit atas akibat dari hubungannya yang bergantian dengan banyak laki-laki. Perubahan akan kata “perempuan” yang bermakna denotasi atau bermakna baik kemudian menjadi “wanita” yang bermakna konotasi atau buruk dalam penggunaan kata “wanita publik” akhirnya mengesampingkan peran dan hak-hak perempuan sehingga perempuan digeneralisir mendapatkan perlakuan negatif atas perbuatan pelacuran.

Jaman penjajahan pula sekitar tahun 1858 sudah muncul rumah-rumah bordil sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak negatif dari adanya pelacuran. (Hull dkk, 1997: 5) Dua puluh tahun setelahnya, pemerintahan pusat melimpahkan segala kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk mengatur

tentang rumah bordil dan aktivitas pelacuran. Karena jelas bahwa pemerintah pusat tidak memiliki kontrol penuh hingga masuk ke seluruh pelosok daerah pada masa itu. Pusat perhatian selain pelimpahan kepada daerah yakni masalah dampak yang ditimbulkan dengan adanya pelacuran. Wanita publik mendapatkan perhatian kesehatan dari pemerintah dengan menerjunkan petugas khusus untuk melihat kondisi kesehatan dan bertanggung jawab penuh. Apabila penyakit yang diderita lebih parah, maka akan diberi perhatian khusus. Oleh karena itu fungsi dari adanya pengelompokan dan penyediaan rumah bordil adalah untuk memudahkan petugas mengontrol bahaya penyakit menular yang dalam hal ini adalah penyakit kelamin dan banyak didapatkan oleh para wanita publik agar tidak tersebar ke masyarakat.

Abad ke-19 sejak diperluasnya industri di segala sektor seperti perindustrian, perhubungan, dan perkebunan membuat penyerapan akan tenaga kerja laki-laki terjadi besar-besaran. Pembangunan jalan, jalur kereta api, bahkan lalu lintas perindustrian dan perdagangan lewat jalur laut pun merangsang pertumbuhan berbagai fasilitas penunjang di sepanjang jalan yang digunakan pekerja tersebut. Berbagai penginapan, warung, tempat peristirahatan sering dijumpai di pinggiran jalan sebagai tempat singgah. Tidak hanya fasilitas berupa fisik yang dibangun, namun juga kebutuhan pekerja akan hubungan personalnya membuat pekerja laki-laki tidak bisa dijauhkan dari aktifitas pelacuran yang disediakan oleh pemilik tempat peristirahatan atau warung tersebut. Di pelabuhan pun sebagai tempat singgah, seluruh fasilitas yang sama disediakan demi kebutuhan para pekerja.

Jakarta punya Kramat Tunggak, Jogjakarta punya Sarkem, Bandung punya Saritem, dan begitu pula Surabaya yang memiliki Dolly. Beberapa lokalisasi ini sudah dinyatakan ditutup oleh pemerintah kota setempat. Lokalisasi Kramat Tunggak yang terletak di Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara pernah menjadi primadona sebagai tempat prostitusi pada tahun 90-an tepatnya di tahun 1970-1999. Sebelum ditutup, gaung Kramat Tunggak terdengar pula hingga ke Asia Tenggara.

Nama Kramat Tunggak berasal dari Kramat dan Tunggak. Kramat berarti nama kawasan yang bernama Kramat Jaya, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Dan Tunggak berarti sebuah pohon yang dipotong kemudian ditancapkan untuk tambatan perahu nelayan ketika sedang berlabuh di pinggir pantai. Kawasan Kramat Tunggak ini adalah lokalisasi dari beberapa tempat prostitusi yang tersebar di wilayah Jakarta antara lain Bina Ria, Volker yang merupakan deretan rel kereta api di Ancol Jakarta Utara, Pasar Senen, Kramat, dan Pejampongan.

Berdasarkan beberapa sumber yang didapatkan dari artikel maupun media *online* bahwa dibawah instruksi dari Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin pada waktu itu meresmikan Kramat Tunggak sebagai Lokasi Rehabilitasi Sosial atau Lokres. Di dalam Lokres Kramat Tunggak ini terdapat Panti Sosial Karya Wanita Teratai Harapan yang menjadi tempat bagi PSK dan mucikari atau germo mendapatkan pelatihan keterampilan dan bimbingan rohani agar mereka mampu beralih profesi dengan bantuan Pemerintah DKI Jakarta. Namun apa yang dilakukan Pemerintah Kota tidak berhasil untuk membina para PSK dan mucikari

ini. Para mucikari atau germo kemudian membangun rumah-rumah di seberang panti dan menjalankan lagi usahanya untuk melakukan kegiatan prostitusi dengan PSK.

Hingga tahun 1970, perkembangan di Lokres Kramat Tunggak semakin pesat. Jumlah germo atau mucikari dan PSK nya bertambah. Selain itu saat melakukan kunjungan ke Bangkok, Thailand, Ali Sadikin melihat bahwa tempat pelacuran disana tidak tersebar karena mereka dijadikan satu tempat dalam lokalisasi. Cara itu kemudian dibawa ke Jakarta dan diadopsi dengan membangun sebuah lokalilasi. Gubernur Ali Sadikin mengeluarkan SK Gubernur DKI Jakarta No. Ca. 7/I/13/1970 tanggal 27 April 1970 tentang Pelaksanaan Usaha Lokalisasi / Relokasi Wanita Tuna Susila serta Pembidangan dan Tanggung Jawab. Isi dari keputusan tersebut adalah penetapan Lokres Kramat Tunggak atau dalam bahasa lain Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin melegalkan tempat prostitusi Kramat Tunggak.

Melegalkan Lokres Kramat Tunggak di atas lahan 12 hektare ternyata membuat perkembangan jumlah PSK dan mucikari meningkat. Saat pertama dibuka ada 300 PSK dan 76 mucikari, namun beberapa tahun setelahnya sudah mencapai lebih dari 2.000 PSK dan 258 mucikari. Seperti lokalisasi pada umumnya, tidak hanya PSK ataupun mucikari saja yang hidup di lokalisasi, melainkan pembantu di wisma-wisma, pedagang asongan atau pedagang keliling, tukang ojek dan tukang becak, jasa cuci pakaian, dan warung di sekitarnya. Pengunjung yang datang juga mampu mempengaruhi jumlah pendapatan yang masuk kepada orang-orang di sekitar Lokres Kramat Tunggak tersebut. (diolah

dari News.okezone.com/“Kramat Tunggak, Lokalisasi Tersohor di Asia Tenggara”. Diakses 25 Februari 2015)

Seiring berjalannya waktu Lokres Kramat Tunggak ditengarai menimbulkan penyakit di tengah-tengah masyarakat. Warga masyarakat di sekitar lokalisasi mendesak agar dilakukan penutupan karena meningkatnya angka kriminalitas dan tindak kejahatan. Kemudian Dinas Sosial DKI Jakarta bekerja sama dengan Universitas Indonesia tahun 1996/1997 dan tahun 1997/1998 melakukan penelitian terhadap Lokres Kramat Tunggak dan menghasilkan rekomendasi bahwa Lokres Kramat Tunggak harus ditutup.

Penutupan pun tidak langsung berjalan secara mulus dan lancar. Banyak pihak berkepentingan yang tidak setuju atas penutupan ini seperti para PSK, mucikari, pemilik wisma, pengelola tempat hiburan, dan pemilik lahan parkir. Masyarakat yang memperoleh keuntungan dengan adanya Lokres Kramat Tunggak pun ikut memprotes. Namun atas himbauan untuk tidak mengulangi kegiatan prostitusi dan bekal pelatihan yang cukup selama sekian tahun kepada PSK dan mucikari, pemerintah menjanjikan jaminan pekerjaan dan jaminan hidup yang layak.

Pendataan akhir menyebutkan bahwa ada 1.615 PSK dan 285 mucikari yang tinggal di 277 bangunan dengan 3.546 kamar. Serangkaian penyebab yang menjadi pertimbangan penutupan adalah bisnis seks kerap kali dekat dengan alkohol dan narkoba. Perkelahian dan penembakan di Kramat Tunggak sering terjadi akibat perselisihan dan salah paham apabila wanita penghiburnya dipakai oleh pelanggan lain. Tepatnya tanggal 31 Desember 1999 melalui SK Gubernur

DKI Jakarta No.6485 / 1998 Lokres Kramat Tunggak secara resmi ditutup oleh Gubernur DKI Jakarta pada saat itu yakni Gubernur Sutiyoso. Dan sekarang di atas tanah bekas Lokres Kramat Tunggak telah berdiri Jakarta Islamic Center (JIC) sebagai pusat kajian dan pengembangan Agama Islam di ibu kota.

Pengusuran wilayah dan tempat tersebut menggunkan traktor. Tidak segan dan langsung dibangun karena ditengarai bahwa tanah yang dulunya dijadikan Lokalisasi Kramat Tunggak merupakan tanah Pemerintah DKI Jakarta. Sebelum pada akhirnya dibangun Jakarta Islamic Center, banyak pertimbangan pembangunan yang akan dilaksanakan di bekas lahan Lokalisasi Kramat Tunggak tersebut, diantaranya adalah perkantoran, gedung atau sarana olahraga, sentra PKL, dan banyak rencana lainnya. Namun keputusan akhir bahwa lahan tersebut dibangun JIC sebagai pusat kajian keagamaan di DKI Jakarta.

Lain cerita dengan Kramat Tunggak, Saritem merupakan tempat lokalisasi terkenal di Bandung. Terletak diantara Jalan Astana Anyar dan Gardu Jati. Atau menurut beberapa sumber lain letaknya berada diantara Jalan Sudirman, Jalan Gardu Jati, dan Jalan Kebonjati. Lokalisasi ini ditengarai sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda ke Indonesia. Tempat ini didirikan oleh orang-orang Belanda yang tinggal di Bandung jaman dulu atau dikenal dengan nama Bumi Priangan sekitar tahun 1838. Berdasarkan cerita dari jaman ke jaman, diketahui bahwa Saritem adalah nama seorang gadis pedagang jamu dari Bandung yang cantik, putih, dan pesonanya mampu memikat hati petinggi *meneer* Belanda. Banyak versi yang menceritakan tentang asal muasal nama Saritem ini. Selain sebagai

penjual jamu, ada yang mengisahkan bahwa nama Saritem berasal dari seorang perempuan hitam manis bernama Nyi Sari di daerah tersebut.

Saritem kemudian dijadikan selir oleh *meneer* Belanda itu dan berganti nama menjadi Nyi Saritem. Nyi Saritem kemudian diutus untuk mencari perempuan-perempuan pribumi guna menjadi teman kencan serdadu Belanda lainnya yang masih lajang. Daerah Gardu Jati merupakan markas militer Belanda di daerah Bandung. Oleh karena itu kemudian Nyi Saritem diberikan rumah di daerah tersebut untuk mengumpulkan perempuan pribumi yang bisa dijadikan teman kencan. Perempuan tersebut kebanyakan berasal dari Cianjur, Garut, Sumedang, dan Indramayu. Beberapa tempat itu pun menjadi tempat terkenal sebagai pemasok perempuan yang berparas ayu. Beberapa tempat berkembang dalam jumlah yang banyak dan kemudian tempat ini dikenal dengan nama Lokalisasi Saritem.

Lokalisasi Saritem memang dekat dengan Stasiun Bandung. Oleh karena itu dengan akses yang terjangkau, perempuan dengan mudah dapat dimasukkan ke lokalisasi ini. Seiring berjalannya waktu, Pemerintah Kota Bandung mengumumkan rencana untuk menutup Lokalisasi Saritem. Namun belum pernah berhasil karena gejolak penolakan yang ditimbulkan berasal dari pihak yang berkepentingan disana. Masyarakat sekitar pun kerap menolak karena mereka mendapatkan keuntungan dari adanya Lokalisasi Saritem.

Sampai suatu waktu dibangunlah Pondok Pesantren Daar At-Taubah Al Islamiyah pada tanggal 2 Mei 2000 pimpinan KH. Ahmad Haedar yang berada di depan jalan masuk menuju Lokalisasi Saritem. Bertujuan untuk mengurangi

kebiasaan dan perilaku masyarakat sekitar dengan adanya lokalisasi dengan harapan akan menurunkan jumlah pelacur dan mucikarinya. Pembinaan yang dilakukan kepada para PSK, mucikari, dan germonya adalah dikumpulkan di suatu tempat untuk dapat mengikuti siraman rohani dan mendapatkan pencerahan. Tindakan ini berdasarkan koordinasi antara Pemkot Bandung, RW, RT, dan pihak pondok pesantren.

Akhirnya pada tahun 1995, Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan Perda No.11/1995 yang mulai diberlakukan pada November 2006 yang menyatakan bahwa semua lokalisasi akan dihapuskan dan seluruh kegiatan prostitusi di Lokalisasi Saritem akan berakhir pada 17 April 2007 pukul 24.00 WIB. Lokalisasi Saritem resmi ditutup pada 18 April 2007 pukul 09.00 WIB oleh Walikota Bandung, Dada Rosada. Diketahui sepuluh hari sebelum eksekusi penutupan, dimana saat diadakan deklarasi Bandung Maksiat Watch (BMW) Dada Rosada berjanji akan menutup Lokalisasi Saritem selamanya.

Tahun 2010 tercatat oleh sensus kependudukan bahwa masih ada sekitar 625 orang PSK dan germo atau mucikari yang masih berada di ex-Lokalisasi Saritem. Memang menutup lokalisasi bukan hal yang mudah. Walau sudah dibendung dengan pembangunan pesantren dan masjid, masalah dan keberadaan prositusi belum terselesaikan. Karena memang lokalisasi menjadi aspek yang multidimensi, tidak hanya soal moral dan agama, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, psikologi, dan kesehatan.

Ditutup pada tahun 2007 tidak membuat jera pelaku prostitusi yang ada di ex-Lokalisasi Saritem. Tahun 2015 tepatnya pada tanggal 20 Mei 2015,

Pemerintah Kota Bandung bekerjasama dengan Kapolrestabes Bandung merazia wilayah ini. Ditemukan 200 PSK dan 400 rumah masih dijadikan tempat prostitusi di ex-Lokalisasi Saritem. Harapan atas kejadian ini adalah Pemerintah Kota Bandung mengambil tindakan tegas untuk meminimalisir kejadian yang sama terulang kembali di ex-Lokalisasi Saritem Bandung. (diolah dari pojksatu.id.lipsus/“Sejarah Lokalisasi Saritem Bandung dari Masa Ke Masa”. Diakses tanggal 20 Mei 2015)

Berdasarkan temuan oleh tim Jawa Pos yang melakukan investigasi di ex-Lokalisasi Saritem Bandung, ibarat kata bahwa penutupan Saritem setengah mati, maka Saritem tak kunjung mati. Saat tim Jawa Pos yang berkunjung ke Saritem melihat wilayah tersebut pasca penutupan memang tidak nampak logo-logo atau reklame bir, kondom, dan iklan lainnya yang biasa menjadi ciri khas di lokalisasi. Gang yang ada di Saritem tidak jauh berbeda dengan yang ada di Lokalisasi Dolly-Jarak Surabaya tepatnya di Jalan Putat Jaya.

Karena tidak ada papan penanda wisma, maka calo sudah hafal mana wisma dan mana rumah tangga. Keadaan di ex-Lokalisasi Saritem sama dengan pemukiman yang padat penduduk. Pembayaran dilakukan oleh tamu kepada calo, dan nanti calo akan mengatur pembayaran kepada mami atau mucikarinya dan kepada PSKnya.

Sistem yang diberlakukan di Saritem hampir sama dengan lokalisasi yang lainnya. Hanya saja penutupan yang saat itu dilakukan oleh Walikota Bandung Dada Rosada adalah dengan menyegel semua wisma yang menampung para PSK dan mucikari. Tahun 2007 sejak penutupan, ada sekitar 20 wisma yang dibeli oleh

Pemkot Bandung dengan tujuan untuk menekan kembali beroperasinya kegiatan prostitusi di wilayah tersebut. Menurut data dari Polsek Andir bahwa wilayah Saritem tersebar di dua RW dengan jumlah total 40 sampai 60 wisma dan kurang lebih 200 PSK tertampung di dalamnya. (diolah dari www.jawapos.com /“Karena Setengah Hati Saritem Tak Kunjung Mati”. Diakses tanggal 5 Maret 2015)

Dua lokalisasi yang telah ditutup sebelumnya yakni Kramat Tunggak di Jakarta dan Saritem di Bandung memiliki pola yang berbeda. Di Kramat Tunggak yang sebelumnya dilegalisasi oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin harus ditutup dan lahannya kemudian dibangun Jakarta Islamic Center. Penutupan dan penggusuran di Kramat Tunggak pun dilakukan dengan bantuan alat berat untuk meratakan bangunan bekas Lokalisasi Karamat Tunggak. Sedangkan di Saritem yang tidak pernah dilegalisasi oleh Pemerintah Kota Bandung harus ditutup namun tempat ini masih mampu beroperasi kembali. Salah satunya penyebabnya adalah kurang tindakan tegas dan persiapan matang dari Pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi pasca penutupan Lokalisasi Saritem. Hal itu terbukti dengan masih ditemukannya PSK dan mucikari di Saritem pada tahun 2010.

Kedua bentuk penutupan lokalisasi tersebut bisa dijadikan contoh untuk menutup Lokalisasi Dolly-Jarak di Surabaya. Namun bukan secara mentah-mentah dicontoh tanpa mempertimbangkan aspek lain dalam penutupan lokalisasi seperti aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan. Perempuan PSK masih menjadi tujuan dan fokus utama dalam sebuah penutupan lokalisasi. Karena lokalisasi ada dan mampu berkembang karena ada hubungan antara perempuan PSK dengan para mucikari, germo, calo, mami, dan pengguna atau *user*. Pemerintah dalam hal

ini sebagai perwakilan negara harus membuat perempuan PSK untuk keluar dari belenggu eksploitasi atas tubuhnya.

Atas permasalahan di atas, tidak hanya di Jakarta dan Bandung saja terdapat lokalisasi. Di Surabaya ada Dolly-Jarak, Bangunsari, Klakah Rejo, Sememi, dan Tambak Asri. Di Yogyakarta ada Pasar Kembang. Di Solo ada Silir. Itu hanya sebagian yang disebutkan dan berada di Pulau Jawa, belum yang ada di luar Pulau Jawa. Lokalisasi memang melekat dengan kegiatan pelacuran atau prostitusi. Adanya komersialisasi dan eksploitasi tubuh perempuan membuat ketidakadilan bagi perempuan PSK itu sendiri. Seperti contohnya upah yang tidak dibayarkan penuh karena harus bagi hasil dengan mucikari dan calonya. Saat itu PSK yang melayani tamu dan dibayar dengan harga penuh, namun biasanya PSK hanya mendapat separuh dari biaya yang dikenakan pada tamu.

Salah satu manifestasi dari ketidakadilan gender menurut Mansour Fakih (1999:17) adalah Gender dan Kekerasan. Perihal yang disoroti antara lain mengenai bentuk kekerasan dalam pelacuran atau prostitusi. Pelacuran merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan kepada perempuan yang diselenggarakan oleh suatu mekanisme ekonomi yang merugikan perempuan. Keadaan perempuan yang kemudian dijadikan korban dalam perputaran ekonomi suatu daerah menjadikan perempuan sebagai komoditas utama dan objek perlakuan semena-mena. Oleh pemerintah pun, seolah kekerasan ini memiliki dua sisi koin yang berbeda. Pemerintah giat untuk melakukan pembersihan terhadap prostitusi, tetapi di sisi lain tidak dipungkiri bahwa perputaran uang dan keuntungan yang didapatkan dari adanya prostitusi sangat menjanjikan.

Perempuan kemudian masuk ke dalam prostitusi. Atau disebut dengan *woman in prostitution*. Dengan kata lain dalam prostitusi tidak hanya persoalan perempuan saja yang menjadi pekerja dan menemukan persoalan. Tetapi di dalam lingkaran tersebut juga masih banyak aktor lain yang memiliki keterlibatan kepentingan. Kekerasan dan kriminalisasi selalu ditujukan kepada perempuan yang ditengarai sebagai “aktor utama”. Sehingga simpul yang melingkari perempuan harus dilihat lebih jauh atas dasar kepentingannya.

Berdasarkan realitas dan fenomena yang ada saat beberapa penutupan lokalisasi, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam bagaimana peta kepentingan yang ada saat penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak di Kota Surabaya. Mengingat lokalisasi ini merupakan yang terbesar dan berada di ibu kota Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya memiliki peran penting sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penutupan dan menghentikan eksploitasi terhadap perempuan PSK dari berbagai aktor dan kepentingan di sekitarnya. Dan yang terpenting adalah sikap dari perempuan PSK saat adanya penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak oleh Pemerintah Kota Surabaya.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana peta kepentingan dalam penutupan lokalisasi Dolly-Jarak di Kota Surabaya ?

2. Bagaimana sikap Pemerintah Kota Surabaya dan perempuan PSK saat proses penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak ?

I.3. Tujuan Penelitian

Di dalam penelitian yang berjudul “Politik Eksploitasi Tubuh Perempuan Studi Tarik Menarik Kepentingan dalam Penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak di Kota Surabaya” tujuan yang ingin dicapai yaitu :

1. Untuk menjelaskan dan memetakan berbagai kepentingan yang ada dalam penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak di Kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui sikap yang diambil atau dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dan perempuan PSK saat proses penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak.

I.4. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai Politik Eksploitasi Tubuh Perempuan Studi Tarik Menarik Kepentingan dalam Penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak di Kota Surabaya diharapkan dapat bermanfaat untuk :

I.4.1. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi keilmuan, utamanya pengembangan Ilmu Politik yang mengkaji mengenai studi gender dan feminisme terutama dalam hal ketidakadilan gender. Disamping itu peneliti berharap dapat berguna sebagai bahan perbandingan bagi penelitian lain yang berhubungan dengan studi gender dan feminisme.

I.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana memetakan kepentingan yang ada di dalam Lokalisasi Dolly-Jarak sampai pada akhirnya lokalisasi di Surabaya ini harus ditutup. Serta membantu memahami diskusi lebih lanjut mengenai sikap yang diambil oleh para perempuan PSK dalam penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak sebagai suatu bentuk keputusan politik yang diambil oleh Pemerintah Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya pun dikaji lebih lanjut mengenai persiapan pra dan pasca penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak agar mampu menyerap dan mengakomodir segala kebutuhan yang multidimensi.

I.5. Kerangka Teori

I.5.1. Teori Feminis Eksistensialis

Jean Paul Satre dan Simon de Beauvoir adalah pemikir kenamaan Perancis yang tidak bisa dilepaskan dari feminis eksistensialis. Satre dalam *Being and Nothingness* membuat perbedaan antara pengamat dan yang diamati dengan membagi Diri kedalam tiga bagian yaitu pertama Ada untuk dirinya sendiri (*pour-soi*), kedua Ada dalam dirinya sendiri (*en-soi*), dan ketiga Ada untuk yang lain.

Ada untuk dirinya sendiri mengacu kepada kehadiran yang bergerak dan berkesadaran yang hanya dimiliki oleh manusia. Ada dalam dirinya sendiri mengacu kepada kehadiran material repetitif yang dimiliki oleh manusia dengan binatang, sayuran, dan mineral. Keberadaan dalam menempatkan Ada dibagi dalam tiga kategori yakni *being in itself*, *being for itself*, dan *being for others*.

Perbincangan mengenai perempuan lebih banyak berpusat pada *being for others* yang menandakan bahwa keberadaan perempuan bersama dengan orang lain. Secara negatif digambarkan bahwa konflik untuk menjadikan diri sendiri sebagai subyek atau *Self* dan menjadikan orang lain sebagai obyek atau *Other*. Feminis eksistensialis melihat bahwa untuk menjadi 'exist', perempuan harus hidup dengan melakukan pilihan-pilihan sulit, dan menjalaninya dengan tanggung jawab, baik atas diri sendiri maupun atas orang lain. (Nugroho, 2008:80)

Simon de Beauvoir mengadopsi bahasa ontologis dan bahasa etis eksistensialisme mengemukakan bahwa laki-laki merupakan "Sang Diri" dan perempuan merupakan "Sang Liyan". Jika Liyan adalah ancaman bagi Diri, maka perempuan adalah ancaman bagi laki-laki. Karena itu, jika laki-laki ingin tetap bebas, ia harus mensubordinasi perempuan terhadap dirinya.

Menurut Dorothy Kauffman McCall dalam Tong (2004:262) operasi perempuan oleh laki-laki menjadi unik karena dua alasan. Yang pertama bahwa operasi laki-laki dan perempuan tidak seperti operasi ras dan kelas melainkan operasi terhadap perempuan adalah fakta historis yang saling berhubungan, suatu peristiwa dalam waktu yang berulang kali dipertanyakan dan diputarbalikkan. Perempuan selalu tersubordinasi laki-laki. Kedua adalah perempuan telah menginternalisasi cara pandang asing bahwa laki-laki adalah esensial dan perempuan adalah tidak esensial.

Perempuan berubah menjadi Liyan kemudian dapat dijelaskan dari bab awal *The Second Sex* yang berjudul *The Point of View of Historical Materialism* dimana Beauvoir menemukan bagaimana perempuan kemudian terpisah dari laki-

laki namun juga menjadi inferior terhadap laki-laki. Ia menyadari bahwa bahasa psikoanalisis yang dikemukakan oleh Sigmund Freud dan bahasa ekonomi yang dikemukakan Marxis belum mampu menjabarkan bagaimana peranan antara antara perempuan dan laki-laki.

Beauvoir melihat bahwa gambaran psikoanalisis yang dikemukakan oleh Freudian hanya menjelaskan bahwa kemanusiaan hanya diperoleh dari impuls-impuls hasrat seksualnya saja, ada sebuah penjelasan Freud mengenai ke-Liyanan perempuan bahwa status sosial perempuan yang rendah kepada laki-laki dikarenakan perempuan tidak memiliki penis atau yang disebut dengan iri penis. Dalam Tong (2004:265) perempuan bukan semata-mata iri terhadap penis karena mereka tidak memiliki penis seperti laki-laki, melainkan karena perempuan menginginkan keuntungan material, sosial, dan psikologis yang didapatkan kepada pemilik penis atau laki-laki. Perempuan adalah Liyan bukan karena mereka tidak memiliki penis melainkan karena mereka tidak memiliki kekuasaan.

Pemikiran mengenai Marxis pun dianggap kurang memuaskan oleh Beauvoir karena perempuan masih dianggap sebagai Liyan. Dalam pembagian kerja yang spesifik maka laki-laki menguasai alat produksi sehingga menjadi borjuis sedangkan perempuan menjadi proletar. Posisi ini akan terus ada sampai kapitalisme berhasil diruntuhkan sampai alat produksi dimiliki pula oleh perempuan secara merata. Namun menurut Beauvoir, perubahan dari kapitalisme menjadi sosialisme tidak serta merta merubah relasi perempuan dan laki-laki. Perempuan dalam Tong (2004:266) akan tetap menjadi Liyan dalam kapitalisme sama halnya menjadi Liyan dalam sosialisme. Karena akar permasalahannya

bukan hanya sekedar faktor ekonomi, melainkan faktor ontologis. Sehingga menurut Beauvoir perempuan paling tidak membutuhkan penghapusan lembaga yang melanggengkan hasrat laki-laki untuk menguasai perempuan.

Beauvoir mengatakan bahwa meskipun fakta biologis dan psikologis tentang perempuan misalnya, peran utamanya dalam reproduksi psikologi relatif terhadap peran sekunder laki-laki, kelemahan fisik perempuan relatif terhadap kekuatan fisik laki-laki dan peran tidak aktif yang dimainkannya dalam hubungan seksual adalah relatif peran aktif laki-laki dapat menjadi benar, namun bagaimana kita menilai fakta ini bergantung pada kita sebagai makhluk sosial.

Beauvoir melabeli tindakan tragis perempuan yang menerima ke-Liyanan mereka sebagai misteri feminin, yang diturunkan dari generasi ke generasi melalui sosialisasi yang menyakitkan. Ia menyatakan bahwa perempuan menyadari perbedaan tubuhnya dengan tubuh laki-laki dari usia yang sangat muda. Dengan pubertas dan dengan semakin tumbuhnya payudaranya dan dengan dimulainya siklus menstruasinya, anak-anak perempuan dipaksa untuk menerima dan menginternalisasi tubuhnya sebagai Liyan yang memalukan dan inferior. Ke Liyanan ini kemudian dilekatkan dalam lembaga perkawinan dan *motherhood*.

Meskipun semua perempuan terlibat dalam permainan peran feminin, menurut Beauvoir dalam Tong (2004:271) ada tiga jenis perempuan yang memainkan peran “perempuan” sampai ke puncaknya. Mereka adalah pelacur, narsis, dan perempuan mistis. Untuk pelacur sendiri memiliki hal yang sangat kompleks. Di satu sisi, pelacur merupakan paradigma perempuan sebagai Liyan,

sebagai obyek dan sebagai yang dieksploitasi. Di sisi lain pelacur adalah laki-laki yang membeli pelayanannya adalah Diri, suatu subyek, seseorang yang mengeksploitasi. Dia melacurkan dirinya menurut Beauvoir bukan hanya semata-mata untuk uang, tetapi juga penghargaan yang didapatkan dari laki-laki sebagai bayaran bagi “ke-Liyanan” nya. Pelacur mendapatkan imbalan karena menjadikan tubuhnya sebagai alat pemenuhan mimpi laki-laki yakni kemakmuran dan ketenaran.

Laki-laki membutuhkan perempuan pelacur lebih dari perempuan membutuhkan laki-laki sehingga paling tidak ia dapat memanfaatkan ke-Liyanannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Kesemua peran tersebut bukanlah konstruksi yang dibangun oleh perempuan sendiri. Karena perempuan bukan bukanlah pembangun dirinya sendiri, perempuan kemudian diumpamakan untuk mendapatkan persetujuan dari dunia maskulin dalam masyarakat yang produktif.

Menurut Beauvoir perempuan selalu dikonstruksikan oleh laki-laki melalui struktur dan lembaga laki-laki. Namun perempuan pada dasarnya sama dengan laki-laki tidak harus meneruskan untuk menjadi apa yang diinginkan laki-laki. Perempuan dapat menjadi subyek daripada obyek. Perempuan pun tidak lebih Ada dalam dirinya sendiri daripada laki-laki. Perempuan seperti juga laki-laki adalah Ada bagi dirinya dan sudah tiba waktunya bagi laki-laki untuk menyadari fakta ini.

Kekuatan dari Teori Beauvoir tentang Eksistensialisme dalam Tong (2004:282) adalah ia memberi penguatan dari kesadaran terhadap perempuan lain akan tubuh dan posisi mereka yang dipaksa untuk menerima keadaan dirinya

sama halnya ketika lingkungan sekitar membuatnya untuk mereka. Beauvoir melihat lebih jauh bahwa situasi akan politik, hukum, ekonomi, sosial, dan kebudayaan adalah faktor-faktor yang mampu menghambat perempuan. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan oleh Beauvoir adalah perempuan dapat mengambil keputusan yang tegas untuk menentukan nasib mereka sendiri walaupun disadari ada kemungkinan tidak ada pilihan positif dan perempuan diharuskan bertanggung jawab pada keputusan yang diambil.

Kelemahan Beauvoir adalah ia kurang memperhitungkan kemampuan dan beban yang harus ditanggung perempuan dalam memutuskan hal yang menyangkut kehidupan perempuan (termasuk tubuh dan reproduksi) yang melekat kuat dari generasi ke generasi. Ia juga tidak melihat perlunya penguatan sesama perempuan atau *sisterhood* yang dapat dilakukan secara kolektif untuk membebaskan diri secara bersama-sama.

I.6. Kerangka Konseptual

I.6.1. Konsep Ketidakadilan dan Kekerasan Gender

Sebuah konsep penting yang menjadi dasar dalam analisis gender menurut Mansour Fakih (1999:7) adalah perbedaan dan pemahaman pengertian mengenai *gender* dan *seks*. Kedua konsep ini memang harus dipahami agar dalam penggunaannya tidak menimbulkan kesalahan penggunaan kata dan makna. *seks* atau *jenis kelamin* merupakan pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis dan melekat terhadap jenis kelamin tertentu. Secara biologis, alat kelamin tersebut tidak bisa dipertukarkan satu dengan yang lainnya

antara alat biologis yang melekat pada manusia laki-laki dan perempuan. Secara permanen dalam bentuk fisiologis atau fisiknya tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis sebagai ketentuan yang Tuhan berikan atau “*given*”.

Konsep lainnya adalah tentang gender yaitu suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi atau dibangun secara sosial dan kultural. Ciri dan sifat itu sendiri mampu dipertukarkan karena tidak selamanya melekat dan mampu berubah sewaktu-waktu. Seringkali gender terlihat seperti sebuah hal yang “*achived*”. Contohnya adalah sifat yang diidentikkan oleh kultural bagi laki-laki adalah keras kepala, kuat, tidak cengeng, dan dianggap sebagai sebuah agen yang melakukan sesuatu terutama di wilayah publik. Namun konstruksi terhadap perempuan berbeda dengan laki-laki bahwa perempuan dianggap lemah, emosional, perasa, lebih banyak menerima, komunal melindungi sebuah kelompok beserta isinya, dan dianggap cenderung hanya berkuat di wilayah-wilayah domestik.

Setelah menjelaskan dua konsep dasar mengenai seks dan gender, yang harus dipahami kemudian adalah konsep mengenai perbedaan gender (*gender differences*) dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Perbedaan gender terkadang diperlukan dalam sebuah analisis untuk mengetahui ruang-ruang mana yang menjadi wilayah antara perempuan dan laki-laki terutama dalam konstruksi sosial budaya maupun pemikiran. Terbentuknya perbedaan gender dapat terjadi karena dikonstruksi, diperkuat, dan disosialisasikan melalui ajaran sehari-hari baik agama maupun negara. Sedangkan ketidakadilan gender yang kemudian mampu menimbulkan masalah antara laki-laki dan perempuan karena dianggap tidak ada

pemberian hak yang adil dan kesetaraan di dalam menghadapi berbagai persoalan sosial masyarakat. Namun ternyata perbedaan gender mampu melahirkan ketidakadilan gender, terutama perempuan.

Ketidakadilan gender menurut Mansour Fakih (1999:12) kemudian melahirkan beberapa tindakan ketidakadilan yang diantaranya adalah gender dan marginalisasi perempuan, gender dan subordinasi, gender dan stereotipe, gender dan kekerasan, yang terakhir adalah gender dan beban kerja. Gender dan kekerasan yang berarti bahwa kekerasan (*violence*) merupakan serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Penyebab utamanya adalah ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Seringkali kekerasan disebabkan oleh bias gender (tampak manakala ada sebuah kepercayaan budaya dan pengaturan struktural lebih cenderung berpihak pada laki-laki daripada perempuan) atau yang disebut sebagai *gender-related violence*.

Gender-related violence menurut Mansour Fakih (1999:18) merupakan kekerasan dalam bentuk pelacuran atau prostitusi yang disebabkan oleh penyelenggaraan suatu mekanisme ekonomi yang merugikan kaum perempuan. Masyarakat dan negara kerap kali menggunakan standar ganda kepada para perempuan pekerja seks komersial atau pekerja seksual tersebut. Di satu sisi pemerintah melarang dan menangkap para pekerja seksual, disisi lain pemerintah menarik pajak dari mereka. Hal lainnya adalah seorang pekerja seksual dianggap rendah oleh masyarakat namun tempat pusat kegiatan mereka atau lokalisasi selalu ramai dikunjungi oleh tamu dan pelanggan.

Pelacuran atau prostitusi yang disebabkan oleh penyelenggaraan suatu mekanisme ekonomi juga mengakibatkan eksploitasi terhadap tubuh perempuan pekerja seksual. Penyelenggara mekanisme ekonomi atau dalam kata lain negara mengeksploitasi tubuh perempuan untuk kepentingan-kepentingan tertentu seperti pemasukan berupa pajak yang diterima dari pengelolaan tempat lokalisasi dan tempat hiburan. Kebanyakan perempuan yang mengalami *gender-related violence* tidak menyadari bahwa tubuhnya sedang dieksploitasi oleh berbagai pihak. Salah satunya adalah penetapan standar ganda yang dikenakan kepada para perempuan tadi. Sehingga beban yang ditanggung oleh perempuan pekerja seksual lebih besar dari pihak lain yang berada di dalam maupun di luar lokalisasi.

Politik eksploitasi tubuh perempuan dimaksudkan sebagai kekuasaan negara sebagai penyelenggara mekanisme ekonomi melakukan eksploitasi terhadap tubuh perempuan. Eksploitasi yang dilakukan berdasarkan ketidakadilan dan kekerasan gender menjadikan perempuan sebagai pusat kepentingan berbagai pihak.

I.6.2. Konsep Negara Menurut Perspektif Kelembagaan

Menurut Max Weber dalam Ramlan Surbakti (1991) negara merupakan suatu komunitas manusia yang secara sukses memonopoli penggunaan fisik yang sah dalam wilayah tertentu. Negara merupakan sumber utama untuk hak menggunakan paksaan. Oleh karena itu politik baginya merupakan perjuangan membagi kekuasaan atau perjuangan untuk mempengaruhi distribusi kekuasaan

baik antar negara maupun antar kelompok dalam suatu negara. Ciri-ciri negara menurut Max Weber antara lain :

- a. Berbagai struktur yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda, seperti jabatan peranan dan lembaga-lembaga negara yang kesemuanya itu jelas batas tugasnya, kompleks, formal, dan permanen.
- b. Kekuasaan untuk menggunakan paksaan dimonopoli oleh negara. Pejabat-pejabatnya mempunyai hak untuk menjatuhkan hukuman dan untuk merampas hak milik, kecuali untuk urusan-urusan individual. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, negara menggunakan militer, polisi, pejabat negara, dan sebagainya. Negara mempunyai kewenangan yang sah untuk membuat putusan final dan mengikat seluruh masyarakat.
- c. Kewenangan untuk menggunakan paksaan fisik tersebut hanya berlaku dalam wilayah negara yang jelas batas-batasnya.

Fungsi negara dalam perspektif kelembagaan berarti bahwa lembaga yang berwenang sebagai perwakilan dari negara berhak untuk melakukan tindakan paksaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan-kewenangan lembaga negara tersebut. Kewenangan tersebut bersifat sah dan mengikat seluruh masyarakat sebagai fungsi dari negara.

I.6.3. Konsep Pelacuran dan Prostitusi

Kartini Kartono (2009:207) menyebutkan bahwa Pelacuran atau Prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus

dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikan. Pelacuran berasal dari bahasa Latin *pro-situere* atau *pro-stauree*, yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan, dan pergendakan. Sedang *prostitute* adalah pelacur atau sundal yang kemudian dikenal dengan nama WTS atau Wanita Tuna Susila dan dalam sebutan lain adalah PSK atau Pekerja Seks Komersial.

Prostitusi merupakan sebuah kegiatan yang di dalamnya terdapat wanita yang dipekerjakan oleh mucikari (orang yang memotong penghasilan para pelacur dengan memberikan imbalan berupa jasa perlindungan dan kontak dengan para calon pelanggan) untuk memberikan jasa seks terhadap kaum laki-laki. (Hull et al, 1997:68)

Menurut Kartini Kartono (2009:216) ketika mendefinisikan prostitusi berarti bahwa prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual dengan pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan orang banyak (promiskuitas) disertai eksploitasi dan komersialisasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya. Sedangkan pelacuran adalah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.

Pelacuran merupakan sebuah keadaan atau kegiatan yang berumur tua bahkan bisa dikatakan lebih tua dan berakhir sama dengan umur manusia. Secara mitos sudah ada sejak zaman dewa-dewa dan dalam agama, pelacuran sudah ada sejak jaman nabi-nabi. Sampai jaman ini pun pelacuran kian marak dan makin

berkembang sesuai dengan kemampuan daya guna teknologi yang dimiliki oleh manusia itu sendiri.

Menurut jumlahnya (Kartono, 2009:253) prostitusi dapat dibagi menjadi dua antara lain:

- a. Prostitusi yang beroperasi secara individual merupakan *single operator*.
- b. Prostitusi yang beroperasi atau bekerja dengan bantuan organisasi dan sindikat yang teratur rapi. Jadi mereka tidak bekerja sendirian akan tetapi diatur melalui sistem kerja suatu organisasi.

Pelacuran yang ada dan berkembang saat ini tidak bisa dipisahkan dari peluang-peluang yang seolah dibiarkan atau dilegalkan oleh pemerintah. Tidak dipungkiri kebutuhan hidup dan perilaku konsumtif bisa menjadi salah satu penyebab pelacuran sebagai cara *instant* untuk mendapatkan keuntungan dan pemasukan yang besar. Beberapa penyebab (Kartono, 2009:242) timbulnya pelacuran antara lain:

- a. Tidak ada undang-undang yang melarang pelacuran dan larangan terhadap orang-orang yang melakukan hubungan seks sebelum atau diluar nikah. Beberapa pasal yang ditetapkan dalam KUHP seperti contohnya dalam Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP belum mampu menekan bahkan menghilangkan praktek pelacuran. Fokus hukuman hanya ditujukan kepada mucikari atau germonya tanpa melihat bagaimana pengguna yang melakukan hubungan seksual sebelum atau diluar nikah. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa ada sifat dari

dalam diri seorang manusia untuk menyalurkan kebutuhan seksual saat sebelum dan diluar perkawinan.

- b. Komersialisasi seks, baik dari pihak germo, mucikari, atau bahkan pihak lain yang memanfaatkan pelayanan seks untuk tujuan komersialisasi seks sebelum atau diluar nikah. Komersialisasi seks berarti perdagangan seks kepada pihak-pihak tertentu dalam bentuk penukaran kenikmatan seksual dengan benda, materi, atau uang.
- c. Adanya eksploitasi terutama dalam zaman modern dimana secara khusus mengeksploitasi perempuan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tujuan komersil. Hal ini juga tidak bisa dilepaskan dari bagaimana budaya yang berkembang di masyarakat masih bersistem patriarki. Beberapa pun memandang bahwa perempuan adalah kaum lemah dan belum mendapatkan perlakuan yang adil dengan laki-laki.
- d. Perkembangan dalam sektor pembangunan, pekerjaan-pekerjaan yang terkonsentrasi kepada laki-laki menyebabkan jumlah laki-laki dan perempuan menjadi tidak seimbang. Pertumbuhan terutama di kota serta arus urbanisasi dan transmigrasi juga mampu memicu adanya pelacuran apabila jumlah tenaga kerja yang diserap tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki kemudian harus mencari penyaluran atas hasrat karena jauh dari keluarga.
- e. Perkembangan arus kebudayaan baik kebudayaan asing maupun lokal setempat yang mengakibatkan terkikisnya nilai-nilai moral di masyarakat. Dengan adanya perkembangan jaman dan globalisasi,

kebudayaan yang ada di masyarakat menjadi rentan akan perubahan-perubahan sosial yang berpotensi terjadi gesekan apabila berbeda pemahaman. Kondisi sosial jadi terpecah sehingga timbul masyarakat yang tak bisa diintegrasikan. Terjadi disorganisasi sosial dan mengakibatkan norma sosial banyak dilanggar. Sehingga tidak sedikit perempuan maupun masyarakat yang kemudian mengalami disorganisasi pribadi dan menginterpretasikan penyaluran hubungan seksual tanpa dasar dan norma sosial yang berlaku di masyarakat.

Beberapa penyebab munculnya prostitusi memang tidak hanya berasal dari faktor internal namun juga dari faktor eksternal. Oleh karena itu pelacuran tidak serta merta langsung tumbuh pada diri perempuan PSK itu, ada beberapa motif yang melatarbelakangi seorang perempuan menjadi PSK dan kemudian terlibat dalam pelacuran menurut Kartini Kartono (2009:245) antara lain :

- a. Adanya kecenderungan melacurkan diri pada banyak wanita untuk menghindarkan diri dari kesulitan hidup dan mendapatkan kesenangan melalui jalan pendek. Kurang pengertian, kurang pendidikan, dan buta huruf sehingga menghalalkan pelacuran.
- b. Tekanan ekonomi, faktor kemiskinan, ada pertimbangan-pertimbangan ekonomis untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, khususnya dalam usaha mendapatkan status sosial yang lebih baik.
- c. Oleh bujuk rayu kaum laki-laki dan para calo, terutama yang menjanjikan pekerjaan-pekerjaan terhormat dengan gaji tinggi. Misalnya sebagai pelayan toko, bintang film, model, dan lain-lain.

Namun pada akhirnya gadis-gadis tersebut dengan kejamnya dijebloskan ke dalam bordil-bordil dan rumah-rumah pelacuran.

- d. Disorganisasi dan disintegrasi dari kehidupan keluarga, *broken home*, ayah atau ibu lari, kawin lagi, atau hidup bersama dengan partner lain. Sehingga anak gadis merasa sangat sengsara batinnya, tidak bahagia, memberontak, lalu menghibur diri terjun dalam diri dunia pelacuran.
- e. Ajakan teman-teman sekampung atau sekota yang sudah terlebih dahulu terjun ke dalam dunia pelacuran.
- f. Mobilitas dari jabatan atau pekerjaan kaum laki-laki dan tidak sempat membawa keluarganya. Misalnya pekerjaan mengemudi, tentara, pelaut, pedagang, dan kaum politisi, yang membutuhkan pelepasan bagi ketegangan otot-otot dan syarafnya dengan bermain perempuan.

Seperti yang disebutkan diatas bahwa motif-motif yang melatarbelakangi pelacuran muncul berdasarkan motif internal dan motif eksternal dari tubuh perempuan itu sendiri. Sedangkan apabila ada penyebab pasti ada akibat yang ditimbulkan dari adanya pelacuran. Akibat dari pelacuran menurut Kartini Kartono (2009:249) antara lain :

- a. Menimbulkan dan menyebabkan penyakit kelamin dan kulit. Penyakit yang paling banyak terdapat ialah *syphilis* dan *gonorrhoe*. Apabila tidak mendapatkan pengobatan yang sempurna, bisa menimbulkan cacat jasmani dan rohani pada diri sendiri serta anak keturunannya.

- b. Merusak sendi-sendi kehidupan keluarga. Suami-suami yang tergoda pelacur biasanya melupakan fungsinya sebagai kepala keluarga, sehingga keluarga menjadi berantakan.
- c. Mendemoralisasi atau memberikan pengaruh demoralisasi kepada lingkungan khususnya anak-anak muda remaja pada masa puber.
- d. Berkolerasi atau dekat dengan kriminalitas dan kecanduan bahan-bahan narkotika seperti ganja, morfin, heroin, dan sejenisnya.
- e. Merusak sendi-sendi moral, susila, hukum, dan agama. Terutama sekali menggoyahkan norma perkawinan sehingga menyimpang dari adat kebiasaan, norma hukum, dan agama karena digantikan dengan pola pelacuran.
- f. Adanya pengeksploitasian manusia oleh manusia yang lain. Pada umumnya wanita-wanita pelacur itu cuma menerima upah sebagian kecil saja dari pendapatan yang harus diterimanya karena sebagian besar harus diberikan kepada geromo, calo, centeng, pelindung, dan lainnya. Sehingga wanita peacur itu dieksploitasi oleh pihak lain yang memiliki kuasa di atasnya.
- g. Bisa menyebabkan terjadinya disfungsi seksual misalnya impotensi dan lainnya.

I.6.4. Konsep Lokalisasi

Sebelum masuk dan mengenal lebih jauh mengenai lokalisasi, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai jenis prostitusi yang dibagi berdasarkan aktivitas dan tempatnya (Kartono, 2009:251) yakni :

- a. Prostitusi yang terdaftar *adalah* pelakunya diawasi oleh pihak kepolisian yang dibantu dan bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Secara umum mereka dilokalisasi dalam suatu daerah atau kawasan tertentu. Secara periodik pelakunya harus memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan dan mendapatkan suntikan serta pengobatan sebagai tindakan kesehatan. Contoh prostitusi yang terdaftar adalah di Lokalisasi Silir Solo dan Lokalisasi Dolly-Jarak Surabaya.
- b. Prostitusi yang tidak terdaftar *adalah* pelakunya merupakan perorangan atau kelompok yang melakukan prostitusi secara gelap-gelapan dan liar. Perbuatannya tidak terorganisasi dan tempatnya pun tidak menetap dan berkeliaran diberbagai tempat. Mereka mencari tamu sendiri dengan bantuan calo atau sebagai panggilan. Kesehatannya pun tidak didapatkan dari Dinas Kesehatan sehingga diragukan. Contohnya adalah PSK yang berada di pinggir jalan atau *call girl* atau wanita panggilan.

Sedangkan berdasarkan tempat penggolongan atau lokasi (Kartono, 2009:251), prostitusi dibagi menjadi :

- a. Segregasi atau lokalisasi *adalah* tempat yang terpisah dari kompleks penduduk lainnya. Biasanya kompleks ini dikenal dengan nama daerah lampu merah atau petak daerah tertutup. Di luar negeri seperti Australia dan Swedia terdapat *Red Light District* yang khusus dijadikan sebagai tempat-tempat pelacuran atau prostitusi.

- b. Rumah-rumah panggilan atau biasa disebut *call house*. Rumah atau di Indonesia kebanyakan disebut sebagai wisma sebagai tempat yang khusus digunakan untuk melakukan kegiatan pelacuran dan prostitusi tanpa harus menjadi pemilik dari rumah tersebut.
- c. Di balik front organisasi atau tempat bisnis formal merupakan sebuah tempat yang memiliki ijin usaha secara legal formal namun dimasukkan perempuan-perempuan PSK ke tempat ini. Seperti contohnya salon kecantikan, panti pijat, rumah makan, tempat karaoke atau tempat hiburan malam, dan café-café.

Lokalisasi *adalah* sebuah kawasan atau tempat yang terdiri dari rumah atau wisma-wisma yang dikelola oleh mucikari atau geromo dan dipergunakan sebagai tempat pelacuran atau prostitusi. Biasanya di Indonesia mucikari atau geromo ini dipanggil “mami” karena dianggap sebagai pengasuh para perempuan PSK. Biasanya mucikari menyewa sebuah rumah atau wisma kepada pemilik wisma dengan cara sewa atau kontrak. Kemudian wisma tersebut dikelola oleh mucikari yang menampung beberapa perempuan PSK dan diizinkan untuk tinggal di wisma tersebut. karena terdiri dari kamar-kamar, maka fasilitas yang didapatkan biasanya ranjang tempat tidur, lemari, meja rias, dan kursi tamu.

Keadaan rumah seperti ini tidak hanya tergambar pada satu dua rumah, melainkan hampir puluhan rumah atau wisma sehingga kemudian disebut lokalisasi. Di beberapa lokalisasi dengan penerapan yang ketat dan disiplin biasanya sudah ada peraturan yang telah ditentukan oleh mucikari. Jadi

perempuan PSK tinggal mengikuti peraturan yang diberikan seperti bagi hasil, sewa tempat tinggal, dan mengajak tamu kencan.

Berikut adalah beberapa tujuan adanya lokalisasi menurut Kartini Kartono (2009:254) antara lain :

- a. Untuk menjauhkan masyarakat umum terutama anak-anak dan remaja. Karena dengan adanya lokalisasi yang merupakan kawasan khusus untuk tempat prostitusi jadi diharapkan dapat menekan pengaruh buruk kepada anak-anak dan remaja.
- b. Untuk memudahkan pengawasan kepada para perempuan PSK atas kesehatan dan keamanannya. Karena dengan melakukan pengawasan, maka beberapa tindakan preventif mampu dicegah agar tidak menyebar kepada perempuan PSK maupun tamu atau pelanggannya.
- c. Memudahkan bimbingan mental bagi para perempuan PSK dalam usaha rehabilitasi dan resosialisasi. Bimbingan mental biasanya dilakukan dengan cara memberikan siraman rohani berupa pengajian rutin, mendatangkan pemuka agama ke lokalisasi, dan pendampingan rohani. Selain itu pendampingan dilakukan dengan memberi keterampilan agar para perempuan PSK bisa mandiri. Keterampilan yang diberikan seperti menjahit, merajut, tata busana, tata boga, dan membatik.
- d. Kalau mungkin diusahakan pasangan hidup bagi para perempuan PSK yang benar-benar bertanggung jawab dan mampu membawanya ke jalan yang benar. Ada dari mereka yang diikutkan dalam transmigrasi

setelah mendapatkan suami, kemampuan, dan keterampilan, dan hidup secara wajar. Upaya ini merupakan salah satu cara pemerataan penduduk dan memperluas lapangan kerja baru.

I.7. Metode Penelitian

I.7.1. Tipe Penelitian

Penelitian tentang Politik Eksploitasi Tubuh Perempuan Studi Tarik Menarik Kepentingan dalam Penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak di Kota Surabaya menggunakan penelitian kualitatif karena ingin mengukur kedalaman fenomena yang sedang terjadi. Sedangkan tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Studi deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang kaya akan informasi melalui penggalian data secara *in-depth* (mendalam) untuk menghasilkan penelitian *thick descriptive* atau deskripsi data yang lengkap.

Karena penelitian dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai penutupan lokalisasi terbesar di Surabaya yang dalam proses tersebut terdapat berbagai kepentingan sebagai bentuk dari eksploitasi tubuh perempuan Pekerja Seks Komersial. Selain itu disebut penelitian deskriptif karena dengan pengumpulan berbagai fakta dari sebuah keadaan maka akan bertujuan mengetahui serta memperoleh gambaran tentang suatu keadaan dengan jelas.

I.7.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk mencari dan memetakan kepentingan yang terjadi dalam penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak di Kota Surabaya.

Kepentingan yang selama ini berada di dalamnya bukan tidak mungkin adalah mengeksploitasi tubuh perempuan yang menjadi Pekerja Seks Komersial. Eksploitasi terhadap perempuan PSK dilakukan sebagai bentuk dari ketidakadilan bahkan kekerasan gender yang diperebutkan oleh berbagai pihak yang ada di dalam lingkungan Lokalisasi Dolly-Jarak. Hal itu yang kemudian membuat para perempuan PSK sulit memiliki pilihan lain untuk keluar dari kawasan tersebut.

I.7.3. Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Surabaya karena judul penelitian yang terfokus di dalam Lokalisasi Dolly-Jarak yang ada di Surabaya. Ketertarikan peneliti untuk mengangkat tema ini juga menjadi alasan pemilihan lokasi penelitian. Selain itu pihak-pihak yang berkepentingan dalam penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak juga berada di Surabaya. Sebelum adanya penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak, peneliti pernah berkeliling ke daerah lokalisasi karena mengikuti penelitian lain. Setelah adanya penutupan, peneliti beberapa kali berkeliling ke daerah Lokalisasi Dolly-Jarak untuk mengetahui dan memahami keadaan di lokalisasi setelah adanya penutupan khususnya perbedaan sebelum dan setelah penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak.

Peneliti juga melakukan pengamatan dan melakukan wawancara dengan beberapa unsur masyarakat yang berada di daerah Lokalisasi Dolly-Jarak yakni dengan menyusuri Jalan Girilaya, Jalan Putat Jaya, Jalan Raya Dukuh Kupang, dan Gang Dolly.

I.7.4. Subyek Penelitian

Penelitian kualitatif menggunakan istilah informan sebagai subjek penelitian, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Untuk menentukan informan yang dibutuhkan, peneliti harus bisa memastikan bahwa informan tersebut mampu memberikan informasi secara baik dan paham mengenai permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

Untuk pemilihan informan, peneliti menggunakan metode *purposive* atau disengaja dimana penentuan informan berdasarkan ketentuan dan kriteria tertentu. Informan ini memiliki pemahaman tentang permasalahan yang dikaji sehingga kemudian mampu memperkuat data dan memperkaya informasi yang dibutuhkan.

Peneliti mengakui bahwa pada awal penelitian, peneliti tidak memiliki kenalan yang tinggal di lokasi penelitian. Namun karena bantuan seorang teman yang beberapa bulan sebelumnya pernah melaksanakan KKN-BBM di Kelurahan Putat Jaya dan kenal dengan salah satu ketua RW, maka peneliti ditemani untuk ke rumah Ibu RW tersebut. Ternyata pada saat kami mengunjungi rumah Ibu RW tersebut, informan tidak ada dan kami bertemu dengan suaminya. Setelah mengutarakan maksud dan tujuan kami ternyata suami yang bernama Bapak Ernest ini merupakan anggota GP Anshor dan menjadi perwakilan dari Kyai serta Ulama di Jawa Timur yang diberikan amanah untuk mengawal penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak.

Di kesempatan berikutnya, akhirnya peneliti memasukkan surat penelitian ke Dinas Sosial Kota Surabaya, Kecamatan Sawahan, dan Kelurahan Putat Jaya. Beberapa instansi ini dituju langsung oleh peneliti sebagai bagian dari Pemerintah Kota Surabaya yang menangani lapangan saat penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak. Di hari yang sama, administrasi dan persetujuan telah diselesaikan oleh peneliti di Kecamatan Sawahan dan Kelurahan Putat Jaya. Namun lurah dan camat pada saat itu belum bersedia untuk diwawancarai. Peneliti mengetahui bahwa masalah penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak ini sangat sensitif untuk dibicarakan tanpa mengetahui akar permasalahannya.

Dua hari setelahnya, peneliti mendapat panggilan dari Dinas Sosial Kota Surabaya. Dibantu Ibu Rosalia dari Bagian Umum Dinas Sosial, peneliti diarahkan menemui Bapak Indra Suryanto dari Seksi Rehabilitasi Anak dan Tuna Sosial. Karena menurut bahasa Dinas Sosial, PSK dan mucikari masuk ke dalam Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang kemudian mereka ditangani oleh sub bagian rehabilitasi tuna sosial. Setelah melakukan wawancara mendalam, peneliti juga diberikan data sekunder mengenai biodata seluruh penerima dana stimulan dari Kementerian Sosial sebagai ganti dari penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak dan dokumentasi yang dimiliki Dinas Sosial.

Bapak Indra mengarahkan peneliti untuk menemui Bapak Deddy Sosialisto yang menjabat sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial untuk mendapatkan penguatan data dari apa yang diberikan oleh Pak Indra. Kedua informan tersebut sama-sama berada di lapangan saat penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak dan menjalankan tupoksi sebagai bagian dari Pemerintah Kota Surabaya.

Peneliti juga memasukkan surat ke Komisi D DPRD Kota Surabaya untuk mengetahui bagaimana peran dan perspektif legislatif dalam penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak. Namun sampai beberapa hari peneliti juga belum mendapatkan panggilan dan izin untuk melakukan wawancara dengan anggota dewan. Akhirnya peneliti menuju kepada LSM Abdi Asih Surabaya yang diperoleh peneliti dari dua penelitian Ilmu Politik sebelumnya yang membahas tentang Lokalisasi Dolly.

Bertemu dengan Ibu Lilik Sulistyowati atau yang akrab disapa dengan Ibu Verra selaku pendiri dari LSM Abdi Asih, peneliti mendapatkan waktu untuk melakukan wawancara. Penentuan subyek penelitian LSM Abdi Asih ditujukan untuk mengetahui bagaimana peran LSM Abdi Asih saat proses penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak. Sebelumnya peneliti mengetahui dari sebuah seminar yang mengundang Ibu Verra sebagai pembicara bahwa LSM ini sejak 1992 mendampingi para mucikari dan PSK. Pendampingan dilakukan agar para perempuan PSK terbebas dari eksploitasi mucikari dan para pelanggan yang kerap kali merugikan PSK. Selain itu LSM juga memberikan pendampingan mereka untuk alih profesi tidak lagi menjadi PSK.

Setelah dari LSM Abdi Asih, peneliti mendapatkan persetujuan dari Bagian Protokoler DPRD Kota Surabaya untuk melakukan wawancara. Wawancara dilakukan terhitung satu bulan setelah peneliti memasukkan surat turun lapangan ke DPRD Kota Surabaya. Oleh sekretaris Komisi D, peneliti diarahkan untuk bertemu dengan Bapak Anugrah Ariyadi. Wawancara dilakukan di luar Gedung DPRD Kota Surabaya. Setelah mendapatkan data dari Pak

Anugrah, peneliti dihubungkan langsung dengan Lurah Putat Jaya yakni Pak Bambang dan Camat Sawahan, Pak Yunus.

Sehari setelahnya peneliti bertemu dengan Pak Bambang dan Pak Yunus untuk melakukan wawancara dan memperoleh data. Karena sudah mendapatkan persetujuan untuk turun lapangan, maka peneliti menentukan RW mana yang akan dikunjungi untuk dilakukan penelitian. RW VI yang memiliki cakupan wilayah Lokalisasi Dolly yang diketuai oleh Bapak Ngadiman akhirnya dipilih sebagai informan. Sama halnya dengan RW III yang memiliki kawasan Lokalisasi Jarak juga dipilih dan Bapak Tjukup sebagai informan peneliti. Tujuan peneliti mewawancarai kedua Ketua RW ini adalah mengetahui sejauh mana peran RW dalam penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak. Ketua RW juga bersentuhan langsung dengan warga di dalam lokalisasi, tentu RW yang mengetahui bagaimana keadaan dan kebutuhan warganya.

Setelah melakukan wawancara dengan kedua Ketua RW tersebut, peneliti berkeliling ke Lokalisasi Dolly-Jarak dan juga menanyakan kepada warga sekitar tentang kondisi saat penutupan dan pasca penutupan lokalisasi. Peneliti kemudian menuju ke rumah Bapak Kartono sebagai pemilik dari Taman Baca Kawan Kami di Lokalisasi Jarak yang berada di Putat Jaya.

Informasi mengenai Pak Kartono didapatkan peneliti dari penelitian sebelumnya, sama dengan keberadaan LSM Abdi Asih. Saat wawancara, peneliti mengetahui bahwa Pak Kartono merupakan mantan mucikari yang dulu memiliki wisma. Dari Pak Kartono kemudian peneliti dipertemukan dengan mantan mucikari, mantan PSK, dan pekerja wisma Lokalisasi Jarak yang berada di sekitar

TB Kawan Kami. Secara ringkas profil dari informan disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel I.1
Informan Penelitian

NO.	NAMA	INSTANSI / ORGANISASI / PEKERJAAN
1.	Drs. Deddy Sosialisto, M.Si.	Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Surabaya
2.	Indra Suryanto	Seksi Rehabilitasi Anak dan Tuna Sosial Dinas Sosial Kota Surabaya
3.	Anugrah Ariyadi, S.H.	Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya
4.	Yunus, S.STP.	Camat Sawahan
5.	Bambang Hartono, S.E.	Lurah Putat Jaya
6.	Bapak Tjukup	Ketua RW III
7.	Bapak Ngadiman	Ketua RW VI
8.	Bapak Ernest	Pemuda GP Anshor Perwakilan dari Kyai dan Ulama NU
9.	Lilik Sulistyowati / Ibu Verra	LSM Abdi Asih
10.	Bapak Kartono	Mantan Mucikari Penggagas Taman Baca Kawan Kami
11.	Mbak IA	Mantan PSK Mantan Mucikari
12.	Mbak ST	Mantan PSK
13.	Mbak FW	Pekerja Wisma

I.7.5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah pedoman wawancara, buku catatan, alat perekam suara, dan kamera. Pedoman wawancara digunakan dalam wawancara mendalam atau *in-depth interview*. Pedoman ini merupakan sekumpulan pertanyaan yang diajukan kepada informan ketika bertatap muka dan berfungsi agar lebih fokus terhadap tujuan penelitian yang ingin dicapai.

Buku catatan berguna untuk mencatat hal-hal penting yang ditemukan saat melakukan wawancara mendalam. Tidak perlu mencatat seluruh jawaban informan karena kebutuhan ini dibantu dengan instrumen lainnya yakni alat perekam suara. Sebelum melakukan wawancara sebisa mungkin peneliti meminta ijin untuk menggunakan alat perekam suara agar tidak ada jawaban informasi yang terlewatkan. Kamera berguna untuk mengabadikan situasi tertentu ketika peneliti membutuhkan data penunjang di lapangan. Seperti contohnya dokumentasi ketika melakukan wawancara dengan para informan, situasi maupun keadaan tempat penelitian, maupun hal-hal penting lainnya yang menunjang kebutuhan data dan bukti akan penelitian.

I.7.6. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data di dalam penelitian ini mencakup beberapa proses. Antara lain observasi, wawancara mendalam, studi literatur atau kajian pustaka, dan mencari data melalui media *mainstream* serta media *online*. Pengumpulan data yang digunakan adalah secara wawancara mendalam / *in-depth interview*. Merupakan suatu prosedur pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara tatap muka dengan yang diteliti atau dalam penelitian ini disebut sebagai informan dengan menggunakan pedoman wawancara. Atau dengan melakukan wawancara tak terstandarisasi. Menurut Harrison (2007:104) wawancara tak terstandarisasi dipahami sebagai wawancara yang informal, fokus, bebas, yang bertujuan untuk mendapatkan data kualitatif secara mendetail. Wawancara ini bersifat fleksibel dengan sedikit pertanyaan

formal sebagai acuan untuk mencegah peneliti menyimpang dari fokus penelitian. Dengan wawancara tak terstandarisasi peneliti dapat melihat sikap atau pemaknaan informan terhadap sebuah fenomena.

Prosedur pengumpulan data lainnya adalah studi literatur atau kajian pustaka. Teknik ini merupakan suatu pengumpulan data yang dilakukan dari buku atau bahan – bahan tulisan yang memiliki relevansi dengan kajian penelitian misalnya jurnal, arsip, maupun penelitian terdahulu. Studi literatur ini juga bisa dilakukan sebelum wawancara dilakukan. Studi literatur dilakukan untuk mencari referensi mengenai keadaan sebelum dan sesudah adanya penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak. Selain itu menunjang berbagai informasi mengenai sejarah pelacuran di Indonesia, sejarah lokalisasi Dolly-Jarak di Kota Surabaya, perkembangan gender, dan masalah-masalah prostitusi.

Mencari data melalui media *mainstream* seperti televisi, radio, dan koran serta media *online* yang bisa diakses lewat internet juga diperlukan dalam proses pengumpulan data. Beberapa berita yang memuat mengenai penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak mampu menunjang peneliti untuk memahami proses, fakta, serta berbagai opini yang dikeluarkan dari berbagai sumber.

I.7.7. Prosedur Analisis Data

Menurut Harrison (2007) prosedur analisis data dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan:

1. Reduksi data atau penyederhanaan data, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat

rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.

2. Paparan data, menyusun data dalam satu kesatuan.
3. Penarikan kesimpulan, yaitu kegiatan menyimpulkan makna-makna yang muncul dari data yang telah dikumpulkan.

Untuk menginterpretasikan pemikiran dan informasi yang berasal dari informan setelah dilakukan prosedur pengumpulan data, maka analisis yang dilakukan adalah dengan mentranskrip hasil wawancara yang sebelumnya dilakukan dengan para informan. Setelah mentranskrip hasil wawancara, kemudian menyesuaikan dan mengurutkan pertanyaan dan pernyataan mana yang sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian. Kemudian peneliti melakukan pemetaan, penyederhanaan, dan penyusunan secara rapi.

Setelah itu menganalisis hasil temuan dengan teori yang sesuai dan relevan dengan masalah yang diteliti. Pemaparan dan pendeskripsian hasil wawancara dengan informan juga dapat digunakan untuk menjelaskan hasil penelitian. Di tahap akhir peneliti menyusun kesimpulan dan memberikan saran yang tepat dan sesuai dengan hasil penelitian sehingga pada kesimpulan akan diperoleh data yang rasional dan ilmiah. Simpulan ini pun kemudian disusun untuk menjadi abstraksi sebagai inti dari keseluruhan penelitian.